



Subag Humas dan TU  
BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tengah

Tahun :

2	0	1	7
---	---	---	---

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Entitas :

Provinsi	Palu	Donggala	Tolitoli	Buol	Sigi	Morowali Utara	Parigi Moutong	Poso	Morowali	Tojo Una-una	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai Laut
----------	------	----------	----------	------	------	----------------	----------------	------	----------	--------------	---------	-------------------	--------------

BPK Tamukan Rp24,49M

**Donggala Paling Banyak Masalah**

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar dengan pengecualian (WGP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Donggala tahun 2016. Posisinya turun dibanding tahun sebelumnya yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Pemerintah Kabupaten Donggala memunculkan sudah mendaklakan sebagai rekamodasi BPK dari tahun anggaran 2015. Namun tidak lanjut tersebut masih belum sigalkan.

"Pemerintah Kabupaten Donggala telah mengambil langkah sebagai rekamodasi BPK, namun tidak lanjut tersebut masih belum sigalkan, memperbaiki pengelolaan aset tetap sehingga masih ditemukan permasalahan," ujarnya.

"Aksi dari peningkatan permasalahan tersebut, BPK mendebatnapi atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Donggala tahun anggaran 2016 namun demikian selanjutnya, yaitu Wajar dengan Pengecualian," kata Bayu.

Penilaian ini diberikan karena sistem informasi aset Kabupaten Donggala belum mengikuti peraturan aset sesuai standar

**● Harus Dikembalikan ke Kas Negara**

Atroptan daerah," kata Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, Bayu Sabana kepada wartawan di kantornya, Rabu (31/5). Hal itu dikemukakan saat penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, semesta kabupaten-kota di Sulawesi Tengah.

Di sisi lain, ditemukan

**Daftar Tamukan BPK di Kabupaten**

- Kota Palu: Rp 6,6 miliar
- Donggala: Rp 2,52 miliar
- Pangkajene: Rp 1,4 miliar
- Poso: Rp 975 juta
- Toli-toli: Rp 2,5 miliar
- Banggai-Laya: Rp 1,1 miliar
- Mayauke: Rp 1 miliar
- Toraja: Rp 1,6 miliar

Bayu juga menjelaskan, selama pemeriksaan ditemukan Rp 5,56 miliar yang harus dikembalikan ke kas daerah. Jumlah itu adalah yang terbanyak bila dibandingkan dengan temuan yang ada di kabupaten-kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Tengah.

Temuan ini menurutnya, juga sangat mempengaruhi sehingga opini Kabupaten Donggala turun dari WTP ke WGP. MAN

**DONGGALA** dari hal ...

akuntansi, inventarisasi aset belum selesai, data kartu inventaris barang tidak informatif dan tidak valid.

Kemudian, penyusutan aset tidak didukung kertas kerja penyusutan, serta aset tanah yang sama dicatat pada tiga SKPD yang berbeda dan ada pula yang dicatat pada dua SKPD yang berbeda, aset tanah belum dicatat, dicatat namun tanpa informasi lokasi dan sertifikat tanah.

Bayu juga menjelaskan, selama pemeriksaan ditemukan Rp 5,56 miliar yang harus dikembalikan ke kas daerah. Jumlah itu adalah yang terbanyak bila dibandingkan dengan temuan yang ada di kabupaten-kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Tengah.

Temuan ini menurutnya, juga sangat mempengaruhi sehingga opini Kabupaten Donggala turun dari WTP ke WGP. MAN